

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI,
KOMPLEKSITAS PEMERINTAH DAERAH DAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP
TEMUAN KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DAERAH
(Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah)**

Fatin Riski Amalia, Agus Purwanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to examine and obtain empirical evidence on the effect of the use of information technology, the complexity of the local government and the follow-up recommendations of audit results of the BPK on the findings of weaknesses in the internal control of district or city local governments in Central Java.

The data population uses the district or city government in Central Java Province. The sample selection method using the purposive sampling method obtained as many as 117 samples with data sources from LHP on LKPD for data on findings of internal control weaknesses, the number of SKPD obtained from LHP on LKPD, SPBE values for data from KemenPAN-RB, e-government values from Diskominfo and TLRHP from BPK RI TLRHP report. Hypothesis testing was carried out using multiple linear regression analysis.

The results obtained in this study indicate that the use of information technology and follow-up on the recommendations of audit results affect on the findings of weaknesses in the internal control of district or city local governments in Central Java Province. Meanwhile, the complexity of the local government does not influence the findings of weaknesses in the internal control of district or city local governments in Central Java Province.

Keywords: Findings of Internal Control Weaknesses, Utilization of Information Technology, Complexity, Follow-Up Recommendations of Audit Results

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mendorong penerapan otonomi daerah yang memberikan tiap wilayah kewenangan untuk mengurus daerah dan pemerintahannya masing-masing. Adanya otonomi daerah dapat meningkatkan potensi terjadinya penyelewengan atau kecurangan (*fraud*) seperti tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menjaga kepercayaan publik terkait dengan kinerja dan pengelolaan keuangan yang dijalankan.

Pengendalian intern berperan penting bagi pemerintah daerah dalam mengoordinasikan dan mengawasi kinerja pemerintah maupun pengelolaan keuangan untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan. Pengendalian intern dilaksanakan terhadap semua aktivitas organisasi untuk melakukan pengamanan dan menghindari pemborosan aset yang dimiliki oleh organisasi, meminimalisasi kecurangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Pengendalian intern yang baik dapat menghindari kehilangan sumber daya organisasi sebagai akibat adanya tindak kecurangan atau penyalahgunaan (Amiseno *et al.*, 2019).

¹ Corresponding author

Pengendalian intern menjadi aspek penting dalam pemerintahan, hal ini dikarenakan pengendalian intern menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam pemeriksaan BPK, apabila terdapat permasalahan maka akan menjadi suatu temuan kelemahan pengendalian intern. Temuan kelemahan pengendalian intern dapat memunculkan potensi kecurangan, khususnya terkait dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Adanya kelemahan pengendalian intern seperti pencatatan yang belum akurat, pencatatan belum tepat waktu, perencanaan program kerja tidak memadai, kegiatan yang dilaksanakan belum berbasis risiko prioritas publik dan belum adanya mekanisme serta *standard operating procedure* yang memadai dapat memunculkan potensi penyalahgunaan atau kecurangan seperti praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan banyak pihak.

Pemerintahan di Indonesia telah menerapkan pengendalian intern. Namun, masih ditemukan permasalahan kelemahan dalam penerapan pengendalian internalnya. Berdasarkan informasi dalam IHPS (BPK RI, 2020a) kelemahan SPI dibagi tiga jenis meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. Hasil evaluasi atas LKPD tahun 2016 s.d 2019 menunjukkan masih terdapat temuan kelemahan yang menunjukkan masih terdapat permasalahan kelemahan pengendalian intern pada pemerintah daerah. Hasil temuan BPK RI pada tahun 2016 menemukan 6.150 temuan kelemahan SPI, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6.053 temuan, tahun 2018 meningkat menjadi 6.222 temuan dan tahun 2019 terdapat 5.858 temuan. Adanya fluktuasi jumlah temuan menunjukkan bahwa implementasi pengendalian intern masih belum sesuai dengan pengendalian intern yang dipersyaratkan atau masih belum optimalnya pengendalian internal di lingkup pemerintah daerah.

Hal ini memunculkan risiko terjadinya kecurangan dan penyimpangan yang akan merugikan negara dan kegagalan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan. Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK RI (2020b) terjadinya pengendalian intern yang lemah disebabkan oleh kurangnya akurasi dalam pencatatan keuangan, komitmen menjalankan tugas belum optimal, pengawasan yang masih lemah pada cakupan yang luas, penggunaan sistem informasi yang belum sepenuhnya diterapkan, pemahaman terhadap aturan yang ditetapkan masih kurang dan belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Laporan hasil pemeriksaan dari BPK dapat menjadi referensi riset terkait faktor yang memberikan dampak pada temuan kelemahan pengendalian intern.

Perkembangan dan penggunaan teknologi informasi telah memengaruhi banyak sektor salah satunya pemerintahan, khususnya dalam sistem informasi akuntansi pada pengolahan data, pengendalian intern organisasi dan peningkatan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Temuan kelemahan pengendalian intern terkait dengan sistem informasi yang belum diterapkan sepenuhnya atau belum memadai maupun adanya proses pencatatan yang tidak akurat. Teknologi informasi dapat mendukung meminimalkan terjadinya ketidakakuratan pencatatan dan kesalahan pelaporan serta memudahkan untuk melakukan integrasi pelaporan keuangan yang ada. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka temuan akan makin rendah jumlahnya. Penggunaan variabel ini didukung hasil riset (Ardi, 2013) dan (Yaya dan Suprobo, 2019) mendukung jika pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat memengaruhi kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari (Yamin dan Sutaryo, 2015) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh pada temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

Kompleksitas pemerintah daerah dapat terlihat dari jumlah SKPD. Banyaknya jumlah SKPD dapat berpengaruh pada temuan kelemahan pengendalian intern, seperti kesulitan dalam menerapkan pengendalian intern, pengawasan yang kurang optimal dan permasalahan terkait pelaporan keuangan di lingkungan SKPD yang berbeda. Variabel ini didukung dengan saran penelitian dari (Yamin dan Sutaryo, 2015) menggunakan satuan kerja untuk memperoleh hasil yang lebih sesuai karena berkaitan langsung dengan organisasi. Penelitian (Khairana, 2018) sejalan dengan pernyataan apabila satuan kerja yang banyak berdampak pada meningkatnya temuan kelemahan pengendalian intern. Sedangkan penelitian dari (Sebayang *et al.*, 2018) dan (Saferi dan Mulyani, 2020) menyatakan apabila kompleksitas pemerintah daerah tidak berpengaruh bagi kelemahan pengendalian intern pada pemerintah daerah.

Faktor yang dapat memengaruhi selanjutnya yaitu tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Dukungan dari riset (Yamin dan Sutaryo, 2015) dan (Sebayang *et al.*, 2018)

menyatakan TLRHP memiliki hubungan yang negatif untuk kelemahan pengendalian intern. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang belum diselesaikan secara tuntas akan memperbesar potensi terjadinya temuan kelemahan pengendalian intern pada tahun berikutnya. Sedangkan hasil penelitian (Akbar, 2017) menyatakan apabila TLRHP tidak berpengaruh secara signifikan bagi kelemahan pengendalian intern dan serupa dengan penelitian dari (Alkam, 2019) bahwa TLRHP memiliki hubungan yang positif pada temuan kelemahan pengendalian intern. Penelitian menggunakan variabel ini masih sedikit diteliti sehingga menarik untuk diteliti kembali.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompleksitas pemerintah daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan tidak dapat terlepas dari sektor publik, dalam suatu negara keberjalannya didasarkan pada rangkaian hubungan antara *principal* dan *agent* (Lane, 2000). Hubungan keagenan dalam pemerintah berhubungan dengan adanya pendelegasian wewenang dari masyarakat (*principal*) kepada pemerintah (*agent*) terkait penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Hubungan keagenan berkaitan dengan masalah-masalah kontraktual, yakni ketidakseimbangan informasi, *moral hazard* dan *adverse selection* (Bergman dan Lane, 1990). Selain itu, pemerintah berpotensi memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) melalui pembuatan keputusan publik.

Teori ini memandang *agent* sulit dipercaya bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* sehingga *agent* memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dan keuangan negara melalui LKPD yang diperiksa BPK. Pemeriksaan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan sebagai alat monitoring untuk publik dan didalamnya terdapat pemeriksaan sistem pengendalian intern. Temuan terhadap pengendalian intern menjadi salah satu unsur hasil penilaian dan dapat memengaruhi hasil pemeriksaan. Terkait pelaksanaan tanggung jawab tersebut maka pemerintah memaksimalkan agar pengendalian intern efektif sehingga menghasilkan laporan informasi yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah (Ardiyanto, 2015).

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Temuan Kelemahan Pengendalian Intern

Adanya temuan kelemahan pengendalian intern dalam pemerintah daerah mengenai pencatatan yang tidak akurat, kesalahan pelaporan, keterlambatan pelaporan dan sistem akuntansi yang masih belum memadai menjadi permasalahan pengendalian intern pemerintah daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penggunaan teknologi informasi dibutuhkan untuk membantu transaksi yang kompleks dan besar juga meminimalisasi salah saji dengan penggantian prosedur menjadi terprogram untuk memastikan setiap transaksi diproses dengan benar, lebih akurat dalam pencatatan dan lebih mengefisienkan waktu dalam penyusunan sehingga organisasi tidak terlambat melakukan pelaporan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat memudahkan proses pengendalian intern dan mengurangi temuan kelemahan dalam pemerintahan agar tidak terjadi ketidakakuratan pencatatan, kesalahan dan keterlambatan pelaporan serta memudahkan untuk melakukan integrasi pelaporan keuangan yang ada.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Utomo, 2006) apabila penerapan teknologi informasi yang tepat dapat berdampak pada pengendalian intern yang lebih optimal karena berkurangnya risiko-risiko dari prosedur manual. Selain itu, didukung juga dengan hasil riset (Ardi, 2013) bahwa adanya kemajuan teknologi informasi akan memengaruhi organisasi dalam hal pengolahan data, pengendalian intern organisasi, peningkatan kualitas dan jumlah informasi pada pelaporan keuangan. Penggunaan variabel ini juga didukung oleh hasil riset dari (Yaya dan Suprobo, 2019) jika pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat membantu pemerintah meningkatkan akuntabilitasnya dan memudahkan adanya pembauran kegiatan pemerintah sehingga pengendalian intern akan efektif dan jumlah temuan kelemahan pengendalian intern akan berkurang.

H₁ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap temuan kelemahan pengendalian intern

Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Temuan Kelemahan Pengendalian Intern

Kompleksitas dalam pemerintah daerah dapat menimbulkan berbagai konflik. Konflik keagenan yang timbul dari delegasi wewenang dari masyarakat dapat dikurangi dengan pemerintah menumbuhkan kepercayaan melalui kinerja yang baik dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, adanya satuan kerja tersebut yang membantu pemerintah untuk menyelesaikan urusan masyarakat. Walaupun begitu, banyaknya satuan kerja dalam daerah akan lebih sulit menerapkan pengendalian intern dan pengawasan yang optimal karena banyaknya perbedaan, seperti pelaporan keuangan tiap satuan kerja, membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan memungkinkan terjadinya keterlambatan pelaporan. Pemerintah daerah dengan kompleksitas tinggi akan lebih sulit untuk menerapkan pengendalian intern secara konsisten pada satuan kerja yang luas karena tingginya perbedaan dalam organisasi.

Kompleksitas dapat berdampak pada meningkatnya jumlah temuan kelemahan pengendalian intern karena pengawasan penerapan yang kurang baik. Sependapat dengan penelitian (Fauza, 2015) yang menemukan hubungan positif antara semakin banyak jumlah cabang organisasi dan penerapan pengendalian intern yang semakin kompleks. Pendapat tersebut ditunjang oleh hasil dari (Yamin dan Sutaryo, 2015) jika kompleksitas tinggi harus diikuti dengan pengawasan yang lebih tinggi karena pengendalian lebih kompleks dan lebih luas. Penggunaan variabel ini juga didukung riset dari (Khairana, 2018) yang menunjukkan semakin banyak jumlah SKPD akan menyulitkan dan semakin rentan masalah pengendalian intern karena perbedaan dari setiap divisi yang ada serta meningkatkan potensi ketidakakuratan dalam melakukan pencatatan.

H₂ : Kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap temuan kelemahan pengendalian intern

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Temuan Kelemahan Pengendalian Intern

Konflik keagenan antara masyarakat dan pemerintah sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan melaporkan hasil kerjanya. TLRHP menjadi salah satu unsur yang menunjukkan kinerja pemerintah makin tinggi jumlah penyelesaian rekomendasi BPK maka pemerintah berkomitmen menjalankan amanat yang diberikan dan menciptakan kepercayaan kepada masyarakat sehingga masalah keagenan dapat berkurang. Pelaksanaan TLRHP yang belum sepenuhnya sejalan dengan rekomendasi BPK mengindikasikan pemerintah belum sepenuhnya berkomitmen memperbaiki permasalahan yang terjadi. Semakin banyak penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan, semakin berkurangnya temuan permasalahan kelemahan pengendalian intern.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (BPK RI, 2019) temuan masalah karena penanggung jawab tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tahun sebelumnya masih banyak ditemukan sehingga pada tahun mendatang masih ditemukan permasalahan. Hasil riset dari (Setyaningrum *et al.*, 2014) dan (Yamin dan Sutaryo, 2015) memperlihatkan penyelesaian TLRHP yang maksimal berguna mengurangi jumlah temuan kelemahan pengendalian intern dan meminimalisasi kecurangan pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, juga sejalan dengan (Sebayang *et al.*, 2018) yang menemukan rendahnya tingkat penyelesaian TLRHP mengindikasikan pejabat belum maksimal menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sehingga jumlah temuan masih tinggi.

H₃ : Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap temuan kelemahan pengendalian intern

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Temuan Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah

Menurut (Widodo, 2016) temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah adalah hasil pemeriksaan oleh BPK atas pengendalian intern yang menunjukkan kasus kelemahan dalam implementasi pengendalian intern pada pemerintah daerah. Temuan kelemahan pengendalian intern diukur dengan jumlah temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Simamarta *et al.*, 2020) pemanfaatan teknologi informasi adalah cara memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan dan meningkatkan kemampuan kerja serta kualitas informasi dalam melakukan aktivitas tertentu tertentu yang didalamnya memproses, menyimpan dan mengirimkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi diukur menggunakan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik dan *e-government*.

3. Kompleksitas Pemerintah Daerah

Menurut (Khairana, 2018) kompleksitas pemerintah daerah adalah keberagaman karakteristik pada pemerintah daerah yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kompleksitas pemerintah daerah diukur dengan jumlah satuan kerja perangkat daerah yang diperiksa BPK.

4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Hasil Pemeriksaan Semester I (BPK RI, 2020a) tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan entitas yang diperiksa atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK.

$$\text{TLRHP BPK} = \frac{\text{Tindak lanjut sesuai rekomendasi} + \text{Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi}}{\text{Jumlah temuan tahun sebelumnya}}$$

Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2016-2020 sejumlah 35 pemerintah daerah meliputi 29 pemerintah daerah kabupaten dan 6 pemerintah daerah kota. Sampel penelitian diperoleh menggunakan metode *purposive sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis datanya berupa data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang diperoleh peneliti dengan perantara dapat berupa situs web, arsip atau laporan.

1. Data temuan kelemahan pengendalian intern diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Jawa Tengah
2. Data *e-government* diperoleh dari laporan pemeringkatan dinas komunikasi dan informatika jawa tengah diperoleh dari laporan pemeringkatan dinas komunikasi dan informatika Jawa Tengah
3. Data sistem pemerintahan berbasis elektronik diperoleh dari laporan pelaksanaan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI
4. Data satuan kerja perangkat daerah diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Jawa Tengah
5. Data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Jawa Tengah

Metode Analisis Data

Penelitian ini mengaplikasikan software SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 26 untuk membantu pengujian hipotesis. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression*) terkait pengujian dengan dua variabel atau lebih. Model persamaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Temuan Kelemahan Pengendalian Intern
 α : Konstanta
X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi
X2 : Kompleksitas Pemerintah Daerah
X3 : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien tiap variabel
e : Kesalahan gangguan (error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Tabel 1
Hasil Perolehan Sampel Penelitian

Kriteria Pemilihan Sampel	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016-2020 yang mempublikasikan Laporan Keuangan dan telah diaudit oleh BPK	35	35	35	35	35	175
BPK perwakilan Jawa Tengah yang tidak menyediakan jumlah temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2016-2020 dalam LKPD hasil audit BPK	0	0	0	0	0	0
Diskominfo Jawa Tengah dan KemenPAN-RB yang tidak memiliki data pemeringkatan <i>e-government</i> dan nilai SPBE pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016-2020	(35)	(1)	0	0	(22)	(58)
BPK perwakilan Jawa Tengah yang tidak mencatumkan jumlah SKPD yang diperiksa pada LHP atas LKPD Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016-2020	0	0	0	0	0	0
BPK perwakilan Jawa Tengah yang tidak mengungkapkan hasil TLRHP dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2016-2020	0	0	0	0	0	0
Total Sampel Penelitian	0	34	35	35	13	117

Populasi penelitian sejumlah 35 pemerintah daerah dengan jangka waktu 5 tahun sehingga dihasilkan 175 LHP atas LKPD. Kemudian dilakukan penyeleksian sampel diperoleh 58 pemerintah daerah yang tidak memiliki informasi nilai *e-government* dan SPBE selama periode 2016-2020. Berdasarkan hasil seleksi diperoleh sampel sebanyak 117 sebagai sampel penelitian.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Temuan Kelemahan Pengendalian Intern	117	1	15	6,76	2,815
Pemanfaatan TI	117	1,36	3,76	2,5515	,57666
Kompleksitas Pemerintah Daerah	117	29	63	44,93	8,793
TLRHP	117	1,17	38,00	9,4456	5,74633
Valid N (listwise)	117				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Uji Normalitas

Pengujian guna mendapatkan informasi normalitas persebaran data di model regresi. Uji menerapkan uji Kolmogorov-Smirnov. Data memiliki distribusi normal apabila nilai yang diperoleh > 0,05.

Tabel 3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		117
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,34916046
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,071
	Negative	-,053
Test Statistic		,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel bebas. Caranya melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) serta nilai *tolerance*. Tolerance > 0,10 dan angka VIF < 10 tidak ditemukan masalah (Ghozali, 2018).

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
TI	,988	1,012
KOMPLEKSITAS	,955	1,047
TLRHP	,950	1,053

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2022

Uji Autokorelasi

Metode yang ada menerapkan uji Durbin-Watson dengan melihat nilai DW bila $du < DW < 4-du$ sehingga gejala autokorelasi tidak ada.

Tabel 5
Hasil Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,551 ^a	,304	,285	2,380	1,820

- a. Predictors: (Constant), TLRHP, TI, KOMPLEKSITAS
- b. Dependent Variable: FICW

Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai DW senilai 1,820 dengan angka dU besarnya 1,7512 dari n sebanyak 117 dan 3 variabel. Hal ini menunjukkan nilai $dU < DW < (4-dU)$ memperlihatkan angka DW di antara nilai dU dan (4-dU) atau $1,7512 < 1,820 < 2,2488$. Oleh sebab itu, ditarik kesimpulan tidak adanya autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian dilakukan menggunakan uji glejser ditinjau dari nilai signifikansi yang diperoleh.

Tabel 6
Hasil Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,347	,966		1,407	,162
	TI	,084	,228	,035	,368	,713
	KOMPLEKSITAS	,008	,015	,052	,545	,587
	TLRHP	-,005	,023	-0,022	-,233	,816

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan dari hasil uji, nilai signifikansi hasil regresi absolute residual terhadap tiap variabel bebas diperoleh angka $> 0,05$ sehingga tidak terindikasi adanya heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi

Pengukuran model untuk menerangkan variabel terikat apabila terdapat penambahan variabel bebas akan berdampak pada perubahan nilai *adjusted R²*.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,551 ^a	,304	,285	2,380

a. Predictors: (Constant), TLRHP, KOMPLEKSITAS, TI

b. Dependent Variable: FICW

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2022

Hasilnya diperoleh informasi besaran *adjusted R²* memiliki nilai 0,285 atau 28,5% yang menunjukkan variabel bebas yang ada memiliki kapabilitas untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 28,5%, sedangkan nilai 71,5% diterangkan oleh variabel lainnya.

Uji Statistik F

Pengujian bertujuan melihat dampak variabel bebas bagi variabel terikat pada waktu bersamaan. Keputusan diambil dengan melihat signifikansi $< 5\%$ (Ghozali, 2018).

Tabel 8
Hasil Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	279,147	3	93,049	16,425	,000 ^b
	Residual	640,152	113	5,665		
	Total	919,299	116			

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2022

Berdasarkan tabel 8 diperoleh informasi uji F memiliki nilai signifikansi 0,000 menunjukkan antar variabel independen berpengaruh secara bersamaan pada variabel dependen karena signifikansi yang ada $< 0,05$.

Uji Statistik t

Uji ini berfungsi untuk melihat kecakapan tiap variabel bebas memberikan pengaruh pada variabel terikat. Pengambilan keputusan ditinjau dari derajat signifikansi $< 0,05$.

Tabel 9
Hasil Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
1 (Constant)	11,265	1,623		6,967	,000
TI	-1,607	,386	-,329	-4,168	,000
KOMPLEKSITAS	,036	,026	,114	1,419	,159
TLRHP	-,216	,039	-,442	-5,484	,000

a. Dependent Variable: FICW

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS, 2022

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka model regresi dalam penelitian ini menggunakan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$FICW = 11,265 - 1,607 TI + 0,036 KOMPLEKSITAS - 0,216 TLRHP$$

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 10
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis		Beta	Signifikansi	Hasil Penelitian
H ₁	Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah	-0,329	0,000	Diterima
H ₂	Kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah	0,114	0,159	Ditolak
H ₃	Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah	-0,442	0,000	Diterima

Berdasarkan tabel 10 maka pembahasan hasil dari pengujian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Temuan Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil uji t terhadap pemanfaatan teknologi informasi dengan koefisien beta senilai -0,329 dan signifikansi senilai 0,000 < 0,050 menandakan adanya pengaruh arah negatif secara signifikan dari variabel pemanfaatan teknologi informasi bagi temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima. Alasan yang mendasari karena pemanfaatan teknologi informasi dalam hal ini penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah sehingga masih ditemukan masalah kesalahan pencatatan, penghitungan yang belum akurat, keterlambatan entitas dalam menyampaikan laporan, salah saji dalam pencatatan dan sistem akuntansi belum memadai masih ditemukan yang menjadi alasan temuan kelemahan pengendalian intern pada pemerintah daerah di Jawa Tengah masih cukup tinggi.

Hasil analisis tersebut konsisten dengan hasil penelitian Utomo (2006) dan Yaya (2019) yang mengungkapkan bahwa pengendalian intern dapat terpenuhi apabila didukung dengan lingkungan yang menggunakan pengolahan data secara elektronik karena berkurangnya risiko dari prosedur manual menjadi terkomputerisasi serta kemajuan pemanfaatan teknologi informasi dapat memengaruhi perkembangan pengendalian intern organisasi yang lebih efektif.

Namun hasil analisis ini berbeda dengan penelitian dari Yamin (2015) yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap temuan

kelemahan pengendalian intern dikarenakan perbedaan sampel penelitian sehingga berdampak pada nilai yang didapatkan berbeda dengan karakteristik tempat penelitian berbeda yang dapat menyebabkan perbedaan hasil yang didapatkan.

Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Temuan Kelemahan Pengendalian Intern

Hasil uji t variabel kompleksitas pemerintah daerah menghasilkan nilai koefisien beta senilai 0,114 dengan besaran tingkat signifikansi $0,159 > 0,05$. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh positif secara signifikan yang diperoleh keputusan hipotesis ditolak. Berdasarkan hasil uji, menggambarkan apabila kompleksitas pemerintah daerah di Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh pada jumlah temuan kelemahan pengendalian intern.

Hal ini dikarenakan tiap SKPD mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan pengendalian dengan baik dan melaksanakan fungsi serta tugas yang sama. Jumlah SKPD yang banyak tidak menjadikan pemerintah daerah kabupaten atau kota lebih sulit melakukan pengaturan dan pengawasan. SKPD sebagai pelaksana pembantu pimpinan daerah juga saling berkoordinasi antar sesama satuan kerja untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan baik. Tiap SKPD juga dituntut berkomitmen dalam melakukan pengendalian pada kinerjanya. Selain itu, temuan kelemahan struktur pengendalian intern tidak disebabkan dari banyaknya SKPD yang diperiksa tetapi satuan pengawas intern yang tidak optimal dalam menjalankan kinerjanya atau entitas tidak memiliki satuan pengawas intern untuk mengawasi penerapan pengendalian intern.

Hasil riset konsisten dengan hasil riset Sebayang *et al.* (2018) dan Saferi (2020) yang menunjukkan jumlah SKPD tidak berpengaruh dengan jumlah temuan kelemahan pengendalian intern dikarenakan jumlah SKPD yang banyak tidak mencerminkan bahwa kompleksitas yang ada juga tinggi, tiap SKPD mempunyai lingkup kerja dan kewajiban yang sama termasuk dalam hal penerapan pengendalian intern sehingga tidak ada perbedaan yang sangat terlihat dari antar SKPD. Berbeda dengan hasil penelitian dari Khairana (2018) bahwa jumlah SKPD mempunyai pengaruh positif terhadap jumlah temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah daerah karena akan semakin rentan terkait permasalahan kelemahan penerapan pengendalian intern.

Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Temuan Kelemahan Pengendalian Intern

Berdasarkan hasil uji variabel ini memiliki pengaruh arah negatif yang signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai koefisien beta sebesar $-0,442$ dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis ketiga diterima. Hasil tersebut dikarenakan tindak lanjut atau penyelesaian yang masih rendah cenderung memiliki jumlah temuan kelemahan pengendalian intern yang banyak. Hal ini mengindikasikan tindak lanjut yang ada juga belum sepenuhnya menyelesaikan temuan sehingga temuan kelemahan pengendalian intern yang ada sebelumnya masih ditemukan.

Pengurangan angka temuan belum diikuti dengan penyelesaian yang sesuai rekomendasi dari BPK dan evaluasi dari tindak lanjut yang telah dilaksanakan sehingga mengakibatkan adanya temuan yang berulang khususnya meningkatkan temuan kelemahan pengendalian intern. Belum ditindaklanjutinya rekomendasi disebabkan beberapa faktor seperti keterbatasan penyelesaian sehingga harus dilimpahkan kepada pejabat yang lebih tinggi sehingga akan memakan waktu lebih lama berakibat pada rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh, berdampak pada kelemahan pengendalian intern yang sama pada tahun selanjutnya.

Hasil penelitian sejalan dengan hasil dari Yamin (2015) dan Sebayang *et al.*, (2018) yang memperlihatkan bahwa TLRHP BPK berpengaruh dengan arah negatif secara signifikan bagi temuan kelemahan pengendalian intern karena komitmen yang masih rendah dan banyaknya faktor yang menghambat tindak lanjut sehingga temuan kelemahan pengendalian intern bertambah. Hal tersebut berbeda dengan hasil dari Bani (2017) yang memperlihatkan tindak lanjut rekomendasi BPK tidak berpengaruh pada jumlah temuan kelemahan pengendalian intern pemerintah.

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan yang didapatkan dari tahapan yang telah dilalui sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terbilang signifikan terhadap temuan kelemahan pengendalian intern karena pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya dilaksanakan pemerintah daerah sehingga temuan kelemahan pengendalian intern yang berkaitan dengan pencatatan belum akurat, salah saji dalam pencatatan dan sistem akuntansi belum memadai masih ditemukan.
2. Kompleksitas pemerintah daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap temuan kelemahan pengendalian pengendalian intern karena SKPD memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama untuk menerapkan pengendalian dengan baik. Temuan kelemahan struktur pengendalian intern tidak disebabkan dari banyaknya SKPD tetapi kinerja satuan pengawas intern yang belum optimal atau entitas tidak memiliki satuan pengawas intern untuk mengawasi penerapan pengendalian intern.
3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berpengaruh secara signifikan terhadap temuan kelemahan pengendalian intern karena tindak lanjut yang ada masih tergolong rendah sehingga temuan yang ada belum sepenuhnya diselesaikan atau ditindaklanjuti yang berdampak pada temuan kelemahan pengendalian intern yang ada sebelumnya masih ditemukan pada tahun berikutnya.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini masih ditemui sejumlah keterbatasan diantaranya:

1. Kendala dalam mendapatkan data penelitian karena adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang ada saat periode penelitian.
2. Masih minimnya penjelasan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan TLRHP yang berkaitan pada temuan kelemahan pengendalian intern.

Saran

Bersumber dari hasil dan keterbatasan yang ada, saran yang dapat diterapkan pada pelaksanaan riset kedepannya sebagai berikut:

1. Penelitian serupa dapat menambahkan variabel-variabel yang memiliki pengaruh lebih signifikan, baik dalam bentuk variabel independen maupun variabel moderasi agar dapat mendukung dan memperkuat hasil penelitian.
2. Teknik pengukuran kompleksitas pemerintah daerah dapat menggunakan metode lain untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data lebih terbaru dan dapat memanfaatkan dari terjadinya wabah Covid-19 untuk pembandingan hasil penelitian antara periode sebelum terjadi pandemi dan saat atau sesudah terjadi pandemi.

REFERENSI

- Akbar, B. A. 2017. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. h. 1–16.
- Alkam, R. 2019. Analysis of Repeated Findings in the Audit of Public Funding of the Regional Representative Council (DPD) of the Political Parties in the Province of Yogyakarta Special Region. *ABIS:Accounting and Business Information System Journal*. Vol. 7, h. 1–19.
- Amiseno, A., N. N. Afiah dan D. Yunita. 2019. Analisa Perbandingan Statistik Kelemahan SPI dan Biaya Politik sebagai Pemoderasi Kerugian Keuangan Daerah pada Belanja Daerah. *Jurnal Statistika*. Vol. 12, No. 02, h. 17–22.
- Ardi, B. K. 2013. Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi terhadap Perkembangan Sistem Informasi Akuntansi. *Dharma Ekonomi*. Vol. 20, No. 38, h. 1–12.
- Ardiyanto, I. 2015. "Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Kasus Satuan

- Kerja Di Jawa Timur)". Universitas Brawijaya.
- Bergman, M. dan J.-E. Lane. 1990. Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*. Vol. 2, No. 3, h. 339–352.
- BPK RI. 2019. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2019*.
- BPK RI. 2020. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020*.
- BPK RI. 2020. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020*.
- Fauza, N. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah se Sumatera). *JOM Fekom*. Vol. 2, No. 2, h. 1–15.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. 9 ed. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Khairana, W. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas SDM, Kompleksitas dan Ukuran Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 7, No. 5, h. 1–19.
- Lane, J.-E. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications.
- Saferi, M. dan E. Mulyani. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Kompleksitas Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. Vol. 2, No. 1, h. 2234–2249.
- Sebayang, J. V., Fachruddin dan F. N. Nasution. 2018. Analysis of Factors Affecting Weaknesses of Internal Control System at District and City Governments in North Sumatera Province. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*. h. 1–11.
- Setyaningrum, D., L. Gani, D. Martani dan C. Kuntadi. 2014. Pengaruh Kualitas Auditor dan Pengawasan Legislatif terhadap Temuan Audit dengan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVII Mataram*. h. 1–47.
- Simamarta, J., Romindo, S. H. Putra, A. Prasetio, M. N. H. Siregar, D. P. Y. Ardiana, D. Chamidah, B. Purba dan Jamaludin. 2020. *Teknologi Informasi dan Sistem Informasi Manajemen*. A. Karim, ed. Yayasan Kita Menulis.
- Utomo, A. P. 2006. Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Proses Auditing dan Pengendalian Internal. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*. Vol. XI, No. 2, h. 66–74.
- Widodo, O. P. 2016. Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Yamin, R. dan Sutaryo. 2015. Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*. h. 1–24.
- Yaya, R. dan H. S. Suprobo. 2019. Determinants of Weaknesses in Internal Control of Provincial Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*. Vol. 20, No. 3, h. 296–309.